

Menanti Demokrasi: Sebuah Ingatan Tentang Kedaulatan Individu, Kesetaraan, dan Keadilan

Chris Ruhupatty

chuhupatty@gmail.com

Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

Abstrak

Dalam percakapan apapun mengenai sistem atau tatanan politik, topik demokrasi dan demokratisasi selalu relevan. Sebelum merenungkannya sebagai sebuah tatanan, ada baiknya kita lebih dulu memahaminya sebagai konsep filosofis. Dengan menggunakan pemikiran Derrida sebagai sumber primer, artikel ini mengeksplorasi demokrasi sebagai sebuah konsep filosofis untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang demokrasi dan perbedaannya dengan demokratisasi. Selain itu, hakikat demokrasi dijelaskan dalam artikel ini melalui lensa hermeneutika. Oleh karena itu, demokrasi, menurut artikel ini, bukanlah sebuah *Idea* tentang tatanan dunia yang ideal, melainkan sebuah a-propriasi terhadap “dunia” yang akan datang. Demokrasi adalah sebuah keberadaan meski tidak pernah hadir di dunia aktual. Ini adalah sebuah keberadaan yang muncul dalam kesadaran manusia. Maka, demokratisasi merupakan upaya manusia untuk merawat ingatan tentang kedaulatan individu, kesetaraan, dan keadilan. Artikel ini ditujukan bagi mereka yang mempelajari pemikiran Derrida, pengamat dan praktisi politik, serta pecinta kebijaksanaan.

Keywords: a-propriasi, demokrasi, Derrida, kedaulatan, rasionalitas.

1. Pendahuluan

“Demokrasi yang akan datang” adalah sebuah aforisme yang diungkapkan oleh Derrida di dalam bukunya berjudul “*Voyous*” (2003). Ungkapan tersebut sekurang-kurangnya memiliki dua makna: (1) Demokrasi telah selalu berangkat dari keadaan yang tidak demokratis, dan (2) Demokratisasi tidak akan pernah mampu mewujudkan demokrasi secara utuh. Menurut Derrida, alasannya adalah karena demokrasi pada dirinya sendiri merupakan realitas yang ada di luar *kedirian* (diterjemahkan dari kata Latin: *ipseity*). Kenyataan tersebut menjelaskan mengapa membuat manusia tidak dapat memahami dan mewujudkan demokrasi secara utuh. Namun, kenyataan yang sama tidak menunjukkan demokrasi sebagai sebuah ketiadaan. Lebih tepat jika dikatakan bahwa demokrasi adalah se-

buah realitas yang ada-di-sana, sesuatu yang-lain, melampaui *diri*, yang kehadirannya telah selalu mengalami penundaan. Sampai disini telah menjadi terang bahwa ungkapan “demokrasi yang akan datang” digunakan Derrida untuk menjelaskan tentang kenyataan bahwa: demokrasi tidak pernah hadir di sini, di ruang dan waktu, secara utuh.

Dalam menjelaskan pandangannya tentang demokrasi, Derrida memperlihatkan sebuah konstruksi berpikir yang berbeda dengan para filsuf Barat pada umumnya. Sebagai contoh bisa ditemukan ketika ia menegaskan bahwa demokrasi tidak ada hubungannya dengan kemampuan *konstitutif* manusia mewujudkan *Idea*. Pandangan tentang *konstitutif* ini merujuk pada *Idea* menurut pemikiran Plato. Dan juga, Derrida menambahkan, Demokrasi tidak ada hubungannya dengan struktur berpikir manusia. Pada bagian ini, Derrida merujuk pada pandangan Kant tentang ide *regulatif* di dalam konstruksi berpikir manusia.

Derrida: “Saya kemudian akan mencoba menunjukkan bahwa ‘demokrasi yang akan datang’ tidak ada hubungannya dengan *konstitutif* (dengan apa yang disebut Plato sebagai paradigmatis) maupun *regulatif* (dalam pengertian Kantian tentang Ide regulatif).”¹

Dalam pernyataan tersebut dengan jelas bahwa Derrida tidak memandang demokrasi sebagai sebuah *Idea* yang bisa, atau harus, diwujudkan di dalam dunia aktual. Pernyataan itu juga menjelaskan bahwa ungkapan “demokrasi yang akan datang” tidak berhubungan dengan sebuah proses dari upaya untuk mewujudkan demokrasi (demokratisasi). Di sini Derrida justru hendak memberikan penegasan bahwa demokrasi pada dirinya sendiri berada di luar jangkauan manusia. Demokrasi berada di luar cakrawala *kedirian*, sehingga tidak akan pernah hadir di-sini, di dalam ruang dan waktu. Atau dengan istilah lain dapat dikatakan bahwa kehadiran demokrasi telah selalu mengalami penundaan.

¹ Derrida, Jacques (2005). *Rogues*. terj. Brault, Pascale-Anne dan Naas, Michael. Stanford: Stanford University Press. hal. 37.

Uraian Derrida tentang demokrasi berangkat dari penjelasan tentang *kedirian*. Derrida menyingkapkan hubungan antara demokrasi dan *kedirian* atau kedaulatan individu. Derrida berpandangan bahwa *kedirian*, yang juga disebut dalam istilah "*autos*," mendahului kedaulatan rakyat (*demos*), dan kedaulatan negara.

Derrida: "Sebelum kedaulatan negara, negara-bangsa, [kedaulatan] raja, atau dalam demokrasi, [kedaulatan] rakyat, *kedirian* menyatakan sebuah prinsip kedaulatan yang sah, supremasi yang terakreditasi atau diakui dari suatu kedaulatan atau kekuasaan, sebuah *kratos* atau krasī."²

Melalui pandangan tersebut ia hendak menunjukkan bahwa *autos* bersifat organik, sedangkan *demos* dan kedaulatan negara merupakan hasil konstruksi manusia. Namun, dalam uraiannya, Derrida tidak berfokus pada perbedaan antara *autos* dan *demos*, tapi ia melampaui perbedaan tersebut dengan berfokus pada penjelasan tentang asal mula *autos*. Dalam hal ini ia hendak menunjukkan dasar dari kedaulatan individu yang menjadi landasan bagi demokratisasi.

Uraian Derrida tentang demokrasi dan kedaulatan disajikan dalam artikel ini dengan menggunakan terjemahan bahasa Inggris dari *Voyous* sebagai sumber rujukan. Pada bagian penutup akan disajikan sebuah penjelasan dengan menggunakan lensa hermeneutika. Oleh sebab itu, artikel ini tidak hanya sekadar menjelaskan demokrasi melalui pemikiran Derrida, tapi juga menjelaskannya dalam sebuah pandangan yang baru.

2. Metode Penelitian

Artikel ini ingin mendalami pengertian demokrasi menurut Jacques Derrida. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengeksplorasi pemikiran Derrida dalam bukunya *Rogues* (2005), terjemahan Pascale-Anne Brault dan Michael Naas (Stanford: Stanford University Press), serta membandingkannya dengan pemikiran Rousseau dalam karyanya berjudul *The Social Contract* (1762).

3. Pembahasan

Demokrasi yang akan datang

Jacques Derrida (1930–2004) di sepanjang tahun 2002 memberikan kuliah umum dengan topik demokrasi. Setahun kemudian diterbitkanlah makalah dari kuliah tersebut dalam sebuah buku berjudul *Voyous*. Terjemahannya dalam bahasa Inggris baru terbit di tahun 2005 dengan judul: *Rogues*:

Two Essays on Reason. Pokok pembahasan terbagi ke dalam dua sub-judul, antara lain: (1) *The Reason of the Strongest*, dan (2) *The "World" of the Enlightenment to Come*.

Pada bagian pertama, Derrida menunjukkan karakteristik kedaulatan, dan di bagian satunya lagi, ia menjelaskan hubungan antara rasionalitas dan kedaulatan atau kekuasaan. Di sini Derrida hendak menunjukkan bahwa demokrasi, sama halnya dengan rasionalitas, sangat bergantung dengan kedaulatan atau kekuasaan. Dengan kata lain, keduanya telah selalu ada begitu saja di luar *diri* dan dalam keadaan tidak berdaya. Namun, manusia telah menggunakan kedaulatannya untuk menggunakan rasionalitas dan demokrasi bagi kepentingan dirinya. Dengan begitu, demokrasi yang diusung sebagai sebuah tatanan yang lebih rasional dan alamiah tidak lebih dari sekadar hasil konstruksi manusia belaka. Alhasil, alih-alih mewujudkan demokrasi sebagai tatanan rasional, manusia justru menghadapi kenyataan bahwa demokrasi pada dirinya sendiri tidak pernah hadir secara utuh.

Kedirian

Derrida menyatakan bahwa kedaulatan individu bersifat sirkular. Artinya, kedaulatan individu berasal dari dan untuk diri sendiri.³ Ini menunjukkan bahwa *kedirian* dan seluruh tindakannya berfokus hanya pada diri sendiri. Segala sesuatu yang terjadi pada *diri* telah selalu berawal dan berakhir pada *diri*.

Kedirian atau kedaulatan individu yang bersifat sirkular ini akan terlihat lebih jelas di dalam konteks realitas politik. Hal ini dijelaskan Derrida dengan mengutip pemikir Prancis bernama Tocqueville. Derrida, melalui "kacamata" Tocqueville, menggambarkan realitas politik yang terjadi di pemerintahan Amerika Serikat (AS). Pemerintahan AS melakukan segala sesuatu atas nama dan demi kepentingan rakyatnya. Mereka tidak pernah melakukan sesuatu atas nama dan demi masyarakat di luar AS. Segala sesuatunya bersifat sirkular, karena berawal dan berakhir pada kepentingan pemerintah dan rakyat AS sendiri. Ini bisa diumpamakan bahwa pemerintah AS telah bertindak seperti "tuhan" dengan kedaulatan yang tidak terbatas. Namun, dari manakah pemerintah AS memiliki kedaulatan yang semacam itu? Tentu saja jawabannya adalah: kedaulatan yang dimiliki oleh pemerintah AS berasal dari diri mereka sendiri.⁴ Sampai di sini telah nyata bahwa kedaulatan atau kekuasaan, baik itu yang ada pada *autos*, *demos*, dan negara, berasal dari diri sendiri. Bukan berasal dari sesuatu di luar diri. Secara lugas bisa dikatakan

² Derrida, 12

³ Derrida, 14

⁴ Derrida, 12

bahwa *diri* telah memberikan kepada dirinya sendiri sebuah kedaulatan atau kekuasaan. Untuk itulah kedaulatan ini bercirikan bersifat sirkular. Berawal dari dan berakhir pada *diri*.

Derrida juga menerangkan kedaulatan yang bersifat sirkular ini dengan menggunakan istilah dalam bahasa Prancis "*voyou*." Istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai "*rogue*." Dan artikel ini menggunakan kata "*bramocorah*" sebagai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Kata "*bramocorah*" sering digunakan dalam konteks politik internasional untuk merujuk pada sebuah negara yang melanggar kewajibannya untuk menghormati hukum internasional.⁵ Dan negara yang masuk pada kategori "*pelanggar*" ini disebut sebagai "*negara bramacorah*." Dalam hal ini pemerintah AS, sejak era presiden Clinton, telah mengangkat diri mereka sendiri sebagai "*polisi*" penjaga perdamaian dunia, sehingga memberikan kewenangan pada diri mereka sendiri untuk menghukum "*negara bramacorah*."⁶

Lebih jelasnya, AS telah memberikan kekuasaan bagi dirinya sendiri untuk secara bebas melakukan agresi militer terhadap "*negara bramacorah*." Dan peran AS sebagai polisi dunia ini semakin tampak dengan jelas pasca serangan 11 September 2001. Tepatnya adalah ketika AS dan sekutunya melakukan agresi militer terhadap Afghanistan dan Irak yang disebut sebagai "*negara bramacorah*." Di mata Derrida, agresi militer yang dilakukan oleh AS dan sekutunya terhadap negara lain termasuk pada kategori "*bramacorah*." Dengan kata lain, Afghanistan dan Irak dihukum oleh "*negara bramacorah*" lainnya. Alhasil, apakah istilah "*negara bramacorah*" masih relevan untuk digunakan jika pada kenyataannya semuanya adalah bramacorah? Hal ini diuraikan Derrida pada bab 9 yang ia beri tema "*(No) More Rogue States*." Dengan demikian, semakin jelas bahwa kedaulatan atau kekuasaan *diri*, *demos*, dan negara berasal dari diri sendiri dan akan berakhir pada diri sendiri juga.

Lebih lanjut Derrida mengungkapkan bahwa kedaulatan atau kekuasaan ini digerakkan oleh hasrat.⁷ Dengan istilah lain ia menjelaskan bahwa kedaulatan merupakan bentuk dari kebebasan untuk menghasrati atau semacam deklarasi bahwa "*saya bisa*." Dan kebebasan untuk menghasrati dalam bentuk ungkapan "*saya bisa*" digunakan sebagai landasan dari demokratisasi.⁸ Namun, itu tidak berarti bahwa demokrasi bertumpu pada *kedirian*. Dengan mengutip Jean-Luc Nancy, Derrida

menjelaskan bahwa terdapat sebuah ruang atau jeda dari kedaulatan atau kebebasan yang bersifat sirkular ini.

Jelasnya, ketika *diri* menghasrati sesuatu itu artinya *diri* melangkah keluar dari dirinya sendiri. Pada saat itulah *diri* berada di antara kemungkinan dan ketidakmungkinan. Artinya, apa yang dihasrati oleh *diri* mungkin saja kembali atau berhasil didapatkan, dan bisa saja kalau apa yang dihasrati tidak mungkin kembali atau berhasil direngkuh *diri*. Apabila *diri* menemukan apa yang di hasratinya, maka *diri* akan mengalami perubahan dibandingkan dengan sebelumnya. Namun, apabila *diri* tidak berhasil menemukan apa yang di hasratinya, maka *diri* akan tetap menjadi sediakala.⁹ Dalam hal ini, Derrida mengulas kondisi "*jeda*" atau situasi di antara kemungkinan dan ketidakmungkinan ini melalui istilah "*im-possible*." Dan artikel ini menggunakan istilah "*dalam segala kemungkinan*" untuk merujuk pada neologisme Derrida di dalam "*im-possible*."

Ungkapan "*dalam segala kemungkinan*" ini digunakan Derrida untuk menunjukkan makna negatif dari kemungkinan dan makna positif dari ketidakmungkinan.¹⁰ Dengan cara itu ia telah menghilangkan perbedaan di antara kemungkinan dan ketidakmungkinan. Untuk itu, mulai saat ini akan disebut sebagai "*dalam segala kemungkinan*." Karena di dalam segala kemungkinan terkuak keberadaan atau intervensi dari yang-lain, yang berada di luar *diri*. Singkatnya, "*dalam segala kemungkinan*" menunjukkan bahwa *diri* sedang menghasrati sesuatu yang berada di luar dirinya. Maka, keberhasilan *diri* menemukan apa yang di hasrati tidak hanya ditentukan oleh *diri* (saya bisa), tapi ditentukan juga oleh yang-lain.

Kenyataan ini turut mengungkapkan apa yang terjadi di dalam realitas politik. Politik telah selalu terkondisikan untuk menghadapi situasi "*dalam segala kemungkinan*."¹¹ Dengan demikian, kedaulatan atau kebebasan *diri* untuk menghasrati telah menyingkapkan keberadaan di luar *diri*. Keberadaan di luar *diri* inilah yang menciptakan jeda atau kondisi "*dalam segala kemungkinan*." Bisa juga dikatakan bahwa ketika *diri* menghasrati sesuatu yang berada di luarnya, maka *diri* sebenarnya sedang berbagi segala kemungkinan dengan keberadaan yang ada di luar tersebut. Itulah mengapa demokrasi tidak melulu bertumpu pada *diri*, tapi sebuah ingatan tentang kedaulatan atau kebebasan yang dimiliki oleh *diri* untuk menghasrati sesuatu yang ada di luar dirinya.

⁵ Derrida, xiii

⁶ Derrida, 99

⁷ Derrida, 15

⁸ Derrida, 22-3

⁹ Derrida, 44-6

¹⁰ Derrida, 84

¹¹ Derrida, 46.

Jadi, demokrasi tidak berhubungan dengan *Idea* atau tatanan yang bersifat alamiah. Demokrasi merupakan keberadaan yang di hasrati oleh *diri*. Namun, karena *diri* menghasratinya di dalam segala kemungkinan, maka demokratisasi terkondisikan berada di antara mungkin dan tidak-mungkin. Secara singkat bisa dinyatakan bahwa demokrasi adalah ingatan tentang kedaulatan dan kebebasan *diri*. Dan ungkapan “demokrasi yang akan datang” merupakan sebuah kenyataan bahwa demokrasi memang ada-di-sana dan tidak akan pernah hadir di sini.

Rasionalitas

Pada bagian terakhir uraiannya, Derrida menjelaskan tentang bagaimana manusia dengan rasionya berusaha untuk membangun sebuah dunia yang satu untuk semua (*universal*). Namun, *Idea* tentang dunia *universal* ini ternyata berujung pada peperangan. Kenyataan ini telah disinggung pada pembahasan sebelumnya mengenai “negara bramacorah.” Dan kali ini Derrida juga menunjukkan contoh lain, yaitu dua buah perang dunia yang terjadi di Eropa. Bisa dikatakan bahwa *Idea* tentang dunia *universal*, dunia yang lebih rasional, dunia yang demokratis, atau dunia yang beradab, ternyata mendapatkan sebuah perlawanan yang cukup serius. Lalu, siapakah yang menjadi lawan? Irasional atau *Idea* yang memiliki perbedaan dalam derajat rasionalitasnya?

Keprihatinan terhadap kenyataan jalan rasionalitas melewati peperangan disuarakan oleh Husserl melalui karyanya yang berjudul *The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology: An Introduction to Phenomenological Philosophy* (1936). Derrida menyoroti keprihatinan Husserl sambil menunjukkan sebuah cara pandang yang berbeda terhadap rasionalitas. Singkatnya, jika peperangan terjadi dengan didasari oleh pertimbangan rasional, lalu bagaimana kita memandang pihak yang menang perang? Apakah pemenang perang adalah pihak yang lebih rasional? Atau pihak yang lebih kuat? Jika pemenang perang adalah pihak yang lebih rasional, maka kenyataan ini sebenarnya sebuah ironi. Bagaimana mungkin rasionalitas menjadi sumber kekerasan terhadap sesama? Dan apabila pemenang perang adalah pihak yang lebih kuat. Itu menandakan bahwa rasionalitas erat hubungannya dengan kedaulatan atau kekuasaan.

Dalam pandangan Husserl, sebagaimana diulas oleh Derrida, peperangan yang terjadi merupakan tanda bahwa rasionalitas sedang mengalami krisis. Alasannya jelas bahwa rasionalitas ternyata bisa menjadi sumber dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Husserl secara spesifik menunjukkan penyebab dari krisis ini terletak pada dua pemahaman,

yaitu: (1) Naturalisme yang mengusung gagasan bahwa segala sesuatunya terjadi dalam proses yang alamiah, dan (2) Objektivisme yang percaya bahwa manusia dapat mengakses dan mewujudkan kebenaran objektif melalui rasionalitas.¹² Dengan kata lain, peperangan yang terjadi di Eropa bisa diterima sebagai sesuatu yang bersifat rasional berdasarkan kedua pandangan tadi. Peperangan yang terjadi adalah bagian dari proses alamiah atau demi menegakkan kebenaran objektif. Ini menunjukkan bahwa ketika rasionalitas diperlakukan secara keras (*kaku*), maka dapat digunakan sebagai “alat” yang sah untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan bagi Husserl kenyataan tersebut menandakan bahwa rasionalitas sedang mengalami krisis. Atau lebih tepatnya, Eropa kala itu sedang mengalami krisis rasionalitas.

Dalam konteks krisis yang melanda Eropa inilah Husserl menyerukan sebuah panggilan untuk menyelamatkan rasionalitas. Ia menyatakan bahwa rasionalitas dapat diselamatkan dengan cara melakukan pertimbangan atau refleksi kritis tentang mana yang lebih rasional.¹³ Karena Husserl memandang bahwa rasionalitas pada dirinya sendiri memiliki kedaulatan. Ini menunjukkan bahwa apa yang bersifat rasional akan memunculkan dirinya sendiri tanpa sokongan kekuasaan individu atau negara. Dengan kata lain, rasionalitas bersifat *universal*, sehingga semua orang dapat mengenalinya. Hal tersebut ia jelaskan dengan mengutip Descartes yang menggunakan matahari sebagai metafora bagi rasionalitas.¹⁴ Dengan demikian, bagi Husserl, rasionalitas tidak perlu melewati jalan perang. Karena apa yang bersifat rasional dengan sendirinya akan dikenali oleh semua manusia. Untuk itu, rasionalitas terhadap dunia *universal* dapat diterima oleh semua pihak tanpa harus melewati peperangan.

Dalam hal ini Derrida memiliki pandangan yang berbeda dengan Husserl. Apabila Husserl memandang bahwa rasionalitas memiliki kedaulatan pada dirinya sendiri, sedangkan Derrida menilai bahwa rasionalitas membutuhkan kedaulatan atau kekuasaan dari luar dirinya. Hal ini dijelaskan Derrida menggunakan istilah “tanpa syarat” (*unconditionality*). Bagi Derrida, rasionalitas atau apa yang dianggap rasional telah selalu berada pada kondisi “tanpa syarat.” Ini adalah sebuah kondisi yang tidak berdaya atau tidak memiliki kedaulatan apapun, sehingga membutuhkan intervensi dari luar dirinya. Itu artinya, rasionalitas telah selalu ada begitu saja dalam kondisi tidak berdaya, kondisi “tanpa syarat.”

¹² Derrida, 124-5

¹³ Derrida, 131

¹⁴ Derrida, 139

Di dalam kondisi seperti itulah kedaulatan atau kekuasaan telah memberikan daya bagi rasionalitas agar dapat memunculkan dirinya.¹⁵ Derrida juga menjelaskan hal ini dengan menggunakan *Idea* Platonian. Ia menunjukkan bahwa *Idea* tidak dapat menunjukkan dirinya sendiri, tapi membutuhkan perangkat dari luar dirinya, yaitu kedaulatan atau kekuasaan negara agar keberadaan *Idea* dapat dikenali.¹⁶ Dengan demikian, Derrida memandang peperangan yang terjadi di Eropa sebagai sebuah krisis yang bukan disebabkan oleh rasionalitas, tapi kedaulatan negara yang menggunakan rasionalitas sebagai “alat” legitimasi dari tindakan atas nama dan untuk kepentingan dirinya sendiri.

Oleh karena itu, di mata Derrida, rasionalitas dan demokrasi memiliki sebuah kesamaan, yaitu: berada di dalam kondisi tidak berdaya, “tanpa syarat,” sehingga bergantung pada kedaulatan dari luar dirinya agar keberadaannya dapat diwujudkan di dalam dunia aktual. Namun, karena rasionalitas dan demokrasi adalah sebuah keberadaan yang hadir di-sana, di luar *diri*, maka perwujudannya di dalam dunia aktual telah selalu terkondisikan mengalami penundaan. Jadi, rasionalitas yang selalu dihubungkan dengan demokrasi tidak pernah hadir secara utuh di dalam ruang dan waktu. Keduanya adalah sebuah kehadiran yang akan datang.

Demokrasi sebagai sebuah a-propriasi terhadap dunia-di-sana

Berangkat dari pemikiran Derrida tentang demokrasi sebagaimana telah diuraikan di atas, artikel ini hendak menunjukkan bahwa demokrasi adalah sebuah bentuk individuasi atau personalisasi terhadap “dunia” yang muncul pada kesadaran manusia. Pandangan tersebut dijelaskan melalui istilah “a-propriasi.” “A-propriasi” sengaja diungkapkan secara privatif untuk memunculkan unsur individuasi atau personalisasi. Dengan kata lain, demokrasi pada dirinya sendiri telah selalu ada begitu saja di luar *diri*. Kemudian muncul sebagai sebuah tatanan dunia di dalam kesadaran manusia, dan manusia menghubungkannya dengan kondisi aktual. Ini menjelaskan bahwa demokrasi dipahami sebagai sebuah tatanan karena tidak pernah hadir di dalam dunia aktual. Singkatnya, manusia melakukan a-propriasi terhadap dunia yang muncul di dalam kesadarannya dan menghasilkan sebuah tatanan yang disebut sebagai demokrasi. Jika seandainya demokrasi telah hadir di dalam dunia aktual, maka a-propriasi terhadap dunia yang muncul di dalam kesadaran akan menghasilkan tatanan yang berbeda.

A-propriasi di dalam konteks ini menjelaskan beberapa hal. Pertama, artikel ini sepakat dengan Derrida yang menyatakan bahwa demokrasi bukanlah sebuah gagasan tentang tatanan ideal atau gagasan tentang kedaulatan individu dan negara. Artikel ini memandang bahwa demokrasi adalah sebuah tatapan (*gaze*) terhadap dunia yang muncul pada kesadaran. Dunia yang dimaksud telah ada begitu saja sebagai sebuah realitas di luar *kedirian*. Ketika dunia tersebut muncul pada kesadaran, maka manusia dengan kedaulatan dan kebebasannya telah menafsirkan dunia tersebut sebagai sebuah tatanan yang disebut sebagai demokrasi. Tafsir ini dihasilkan karena ketidakhadiran demokrasi pada dunia aktual. Untuk itu, demokrasi pada dirinya sendiri telah selalu terkondisikan sebagai sebuah tatanan yang akan datang. Dan kehadirannya di dunia aktual telah selalu mengalami penundaan.

Kedua, demokrasi merupakan wujud dari keberanian *diri* untuk keluar menghasrati yang-lain, yang berada di luar *diri*. Meskipun pada akhirnya *diri* telah selalu menundukkan, atau melakukan a-propriasi, terhadap yang-lain, tapi dari sini ditemukan intervensi yang-lain di dalam *diri*. Dengan begitu, a-propriasi menunjukkan *jejak* yang-lain, atau harapan yang-lain, di dalam *diri*. Dan di dalam konteks inilah demokrasi muncul sebagai sebuah keberanian manusia untuk mendesain sebuah tatanan sebagai hasil kontemplasi terhadap “dunia” yang ada-di-sana.

Ketiga, demokratisasi adalah sebuah kemungkinan. Setidaknya disebabkan oleh dua hal, yaitu: (1) Demokrasi adalah a-propriasi terhadap dunia yang muncul pada kesadaran, sebagaimana telah diuraikan di atas, dan (2) Demokratisasi sangat bergantung pada kedaulatan atau kekuasaan individu dan negara. Berdasarkan kedua hal tersebut, demokratisasi telah selalu menghadapi tantangan dari internal manusia. Karena bisa saja manusia menyimpangkan demokrasi atau melakukan legitimasi terhadap kepentingan *diri* atas nama demokrasi. Oleh sebab itu, demokratisasi membutuhkan keberanian manusia untuk melangkah ke luar dari dirinya sendiri dan menghasrati yang-lain.

Jadi, demokrasi bukanlah sebuah *Idea* atau kondisi ideal dari sebuah tatanan, tapi hasil a-propriasi terhadap “dunia” yang muncul pada kesadaran. Singkatnya, manusia menghubungkan dunia aktual dengan tatanan yang menghormati kebebasan individu, menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan. Walaupun kedua dunia tadi tidak memiliki hubungan apapun. Alhasil, demokrasi pada dirinya sendiri hadir di dunia aktual hanya sebagai ingatan tentang “dunia” yang ada-di-sana.

¹⁵ Derrida, 134

¹⁶ Derrida, 137-8

4. Simpulan

Demokrasi dibangun atas dasar kedaulatan individu. Itu tandanya, kedaulatan individu (*autos*) mendahului kedaulatan rakyat (*demos*), bahkan kedaulatan negara. Prinsip ini bukan sesuatu yang baru pada diskursus tentang tatanan negara. Karena sudah diuraikan sebelumnya oleh Rousseau dalam karyanya berjudul *The Social Contract* (1762).

Rousseau: "Manusia dilahirkan bebas, dan di mana pun dia dirantai. Ada beberapa orang yang mungkin percaya bahwa diri mereka adalah tuan bagi orang lain, dan [sebenarnya] mereka juga diperbudak."¹⁷

Jelas bahwa bagi Rousseau, *autos* bersifat alamiah sedangkan *demos* dan kedaulatan negara adalah hasil konstruksi manusia. Melalui "kacamata" Rousseau tampak jelas terlihat bahwa *autos* telah dineutralisir oleh keberadaan negara. Karena di bawah tatanan hidup bersama, setiap individu diminta untuk secara sukarela menyerahkan atau membatasi kewenangannya. Dan sebagai hasilnya, lanjut Rousseau, negara akan memberikan perlindungan terhadap hak individu dalam hal kepemilikan.¹⁸ Itu artinya, kedaulatan negara dikondisikan bersifat absolut, bukan hanya terhadap individu, tapi juga terhadap benda dan alam. Dengan begitu, manusia dalam kedaulatan atau kebebasannya telah menciptakan sebuah tatanan yang menguasai dirinya sendiri dan alam sekitar. Sampai di sini bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa kedaulatan individu bersifat alamiah, tapi *demos* dan kedaulatan negara telah selalu merupakan hasil konstruksi manusia. Berdasarkan kenyataan tersebut, demokrasi sebagai sebuah konsep filosofis, dan sekaligus sebagai sistem politik, yang merupakan hasil buatan manusia. Bukan sesuatu yang bersifat alamiah.

Di dalam artikel ini dijelaskan bahwa demokrasi, sebagai hasil karya manusia, tidak berasal dari sebuah gagasan tentang tatanan yang lebih ideal atau alami. Demokrasi adalah hasil a-propriasi terhadap "dunia" yang muncul pada kesadaran manusia. Oleh sebab itu, di dalam demokratisasi terkandung "dunia yang akan datang" dan personalisasi manusia terhadapnya. Hal ini menjelaskan bahwa demokratisasi tidak bisa dilepaskan dari kedaulatan atau kekuasaan. Karena demokratisasi adalah upaya untuk merawat ingatan atau kesadaran tentang kedaulatan individu, kesetaraan, dan keadilan.

Dengan demikian, demokrasi dan demokratisasi adalah upaya manusia untuk keluar dari *kedirian*

yang bersifat sirkular untuk melakukan kontemplasi terhadap yang-lain. Meski pada akhirnya *kedirian* telah selalu berhasil melakukan personalisasi terhadap yang-lain, tapi setidaknya terdapat upaya untuk merawat ingatan tentang dunia yang akan datang.

Daftar Pustaka

Derrida, Jacques (2005). *Rogues: Two Essays on Reason*. Stanford: Stanford University Press.

Rousseau, Jean-Jacques (1999). *The Social Contract* dalam *Oxford World Classics: Jean-Jacques Rousseau The Social Contract*. Oxford: Oxford University Press.

Referensi lainnya

Derrida, Jacques (2006). *The Politics of Friendship*. London: Verso.

Hobbes, Thomas (2017). *Leviathan*. London: Penguin Classics.

Locke, John (1988). *Two Treatises of Government*. Cambridge: Cambridge University Press.

Plato (2020). *Republic* dalam *Oxford's World Classics*. Oxford: Oxford University Press.

¹⁷ Rousseau, Jean-Jacques (1999). *The Social Contract* dalam *Oxford World Classics: Jean-Jacques Rousseau The Social Contract*, terj. Betts, Christopher. Oxford: Oxford University Press. hal. 45.